

## DINAMIKA POLITIK LOKAL PENGANTIAN CALON WAKIL BUPATI MAROS PADA PILKADA KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

Muhammad Salman<sup>1\*</sup>, Sukri Tamma<sup>2</sup>, Ariana Yunus<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin. Indonesia  
\*Korespondensi: [salmantomtom2019@gmail.com](mailto:salmantomtom2019@gmail.com)

\*\*\*

### Citation (APA):

Salman, M., Tamma, S., & Yunus, A. (2026). Dinamika Politik Lokal Penggantian Calon Wakil Bupati Maros Pada Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 346–357. <https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5825>

### Email Authors:

[salmantomtom2019@gmail.com](mailto:salmantomtom2019@gmail.com)  
[sukripolitik@gmail.com](mailto:sukripolitik@gmail.com)  
[arianayunus@gmail.com](mailto:arianayunus@gmail.com)

Submitted: 31 Mei, 2026

Accepted: 21 Juni, 2026

Published: 30 Juni, 2026

Copyright © 2026 Muhammad Salman, Sukri Tamma, Ariana Yunus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



### ABSTRAK

Pergantian calon wakil bupati dalam kontestasi politik lokal tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan, legitimasi, dan identitas politik seorang aktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik lokal dalam pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui perspektif identitas politik dan pengakuan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi media dan sumber data sekunder. Hasil tulisan menunjukkan bahwa pergantian kandidat memengaruhi posisi politik, legitimasi sosial, dan pengalaman pengakuan seorang aktor yang sebelumnya memiliki status sebagai wakil bupati petahana. Fenomena tersebut juga memperlihatkan peran elit politik dan partai dalam menentukan akses terhadap kekuasaan. Penelitian menyimpulkan bahwa konflik politik lokal berlangsung melalui proses perubahan pengakuan, distribusi kekuasaan, dan negosiasi identitas politik.

**Kata kunci:** Politik Lokal; Identitas Politik; Pengakuan Politik; Pilkada Maros

### ABSTRACT

*The replacement of a deputy regent candidate in local political contests is not merely related to administrative procedures but also reflects the dynamics of power, legitimacy, and the political identity of an actor. This study aims to analyze local political dynamic in the replacement of the Maros Deputy Regent candidate during the 2024 Regional Head Election through the perspective of political identity and recognition. This article employs a qualitative method with data collection techniques based on media documentation and secondary data sources. The findings indicate that candidate replacement affects the political position, social legitimacy, and recognition experience of an actor who previously held the status of an incumbent deputy regent. The phenomenon also highlights the role of political elites and parties in determining access to political power. This study concludes that local political conflict occurs through processes of changing recognition, power distribution, and the negotiation of political identity.*

**Keywords:** Local Political; Political Identity; Political Recognition; Maros Regional Head Election

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang kontestasi kepentingan, pembentukan identitas politik, dan pertarungan kekuasaan antaraktor politik. Dalam demokrasi elektoral, proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, melainkan merupakan proses sosial-politik yang melibatkan pembentukan legitimasi, distribusi sumber daya politik, serta negosiasi antara kandidat, partai politik, dan kelompok pendukung. Politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa kandidat memperoleh posisi politik melalui kombinasi antara modal sosial, jaringan elite, dukungan organisasi politik, dan kemampuan membangun legitimasi publik (Aspinall & Berenschot, 2019). Politik lokal tidak hanya menjadi

ruang kompetisi antarindividu, tetapi juga arena tempat berbagai aktor mempertahankan kepentingan, membangun aliansi, dan memperebutkan sumber daya politik. Dalam demokrasi elektoral, hubungan antara kandidat dan struktur politik sering kali dibentuk melalui proses negosiasi yang melibatkan elite partai, kelompok kepentingan, dan jaringan sosial lokal (Aspinall & Berenschot, 2019). Oleh karena itu, perubahan dalam proses kandidasi, termasuk pergantian calon, tidak hanya berdampak pada struktur kompetisi elektoral, tetapi juga dapat memengaruhi identitas dan posisi sosial-politik seorang aktor.

Dalam konteks demokrasi lokal Indonesia, kandidat politik merupakan aktor yang memperoleh legitimasi melalui proses sosial yang panjang. Kandidasi tidak hanya menghasilkan posisi formal dalam pemilu, tetapi juga membentuk identitas politik seseorang sebagai representasi masyarakat dan bagian dari elite pemerintahan lokal. Kandidat politik memperoleh kekuatan bukan hanya melalui pencalonan formal, tetapi juga melalui proses pembangunan citra, hubungan sosial, dan kemampuan membangun kepercayaan publik. Identitas politik seorang kandidat terbentuk melalui interaksi antara pengalaman pribadi, dukungan institusi politik, serta persepsi masyarakat terhadap kapasitas kepemimpinannya. Studi mengenai politik lokal menunjukkan bahwa kompetisi elektoral sering kali dipengaruhi oleh hubungan antara elite politik, jaringan sosial, dan modal politik yang dimiliki kandidat (Mietzner, 2020). Struktur politik lokal memperlihatkan bahwa keputusan mengenai pencalonan sering kali tidak sepenuhnya ditentukan oleh preferensi pemilih, tetapi juga oleh proses internal elite yang mengatur distribusi kesempatan politik kepada kandidat tertentu (Aspinall & Rohman, 2017). Dengan demikian, ketika seorang kandidat mengalami perubahan posisi atau kehilangan kesempatan dalam kontestasi, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai perubahan dalam struktur relasi sosial dan politik, bukan hanya sebagai persoalan administratif.

Fenomena pergantian calon wakil kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2024 menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dalam perspektif sosiologi politik. Pada awal tahapan pencalonan, Suhartina Bohari yang merupakan Wakil Bupati Maros petahana kembali diposisikan sebagai bakal calon wakil bupati mendampingi Chaidir Syam dalam kontestasi Pilkada Maros 2024. Sebagai pejabat petahana, Suhartina memiliki modal politik berupa pengalaman pemerintahan, jaringan sosial, dan legitimasi elektoral dari posisi sebelumnya sebagai wakil kepala daerah. Dalam politik demokrasi, posisi politik tidak hanya berkaitan dengan jabatan formal, tetapi juga dengan pengakuan sosial terhadap kapasitas dan representasi seseorang (Sawer, 2020). Oleh karena itu, pencalonan kembali Suhartina Bohari menunjukkan bahwa dirinya telah memperoleh pengakuan politik sebagai aktor yang dianggap memiliki kapasitas untuk kembali menduduki posisi publik.

Namun, proses pencalonan tersebut mengalami perubahan setelah hasil pemeriksaan kesehatan dalam tahapan Pilkada menyatakan bahwa Suhartina Bohari tidak memenuhi syarat (TMS). Salah satu aspek yang menjadi perhatian publik adalah hasil pemeriksaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Suhartina Bohari terindikasi positif metamfetamin berdasarkan pemeriksaan urine dalam rangka tahapan Pilkada 2024. BNN Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa dari 140 bakal calon kepala daerah yang menjalani pemeriksaan, terdapat satu kandidat yang terindikasi positif, yaitu bakal calon wakil bupati Maros Suhartina Bohari (DetikSulsel, 2024). Peristiwa tersebut kemudian berdampak pada perubahan komposisi pasangan calon. Suhartina Bohari yang sebelumnya dipersiapkan sebagai pasangan politik Chaidir Syam akhirnya digantikan oleh Andi

Moetazim Mansyur sebagai calon wakil bupati Maros. Pergantian tersebut tidak hanya menciptakan perubahan konfigurasi politik pasangan calon, tetapi juga melahirkan dinamika sosial-politik terkait posisi dan identitas Suhartina sebagai aktor politik. Sebelumnya, Suhartina telah memperoleh pengakuan politik sebagai wakil bupati petahana dan kandidat yang akan kembali berkompetisi dalam Pilkada. Namun, keputusan tersebut mengubah kedudukannya dari aktor utama dalam arena elektoral menjadi aktor yang berada di luar kontestasi pencalonan. Dalam pemberitaan media, Suhartina menyatakan bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang polemik terkait hasil pemeriksaan tersebut dan tetap menjalankan tugas pemerintahan sebagai wakil bupati (DetikSulsel, 2024).

Fenomena tersebut penting dikaji karena konflik politik tidak selalu hadir dalam bentuk persaingan terbuka antarpolisi atau kelompok pendukung, tetapi juga dapat muncul melalui pengalaman subjektif aktor politik ketika mengalami perubahan status, kehilangan legitimasi, atau berkurangnya pengakuan sosial. Konflik politik dalam demokrasi modern sering berlangsung melalui mekanisme yang lebih halus, seperti perubahan akses terhadap sumber daya, pengurangan ruang partisipasi, maupun perubahan status dalam struktur kekuasaan. Konflik tersebut dapat berlangsung tanpa konfrontasi langsung, tetapi tetap memengaruhi hubungan antaraktor politik (Tilly & Tarrow, 2019). Dalam perspektif Axel Honneth mengenai teori pengakuan (*recognition theory*), konflik sosial muncul ketika individu mengalami kegagalan memperoleh pengakuan yang dianggap sesuai terhadap identitas, kontribusi, dan posisi sosialnya. Honneth menjelaskan bahwa identitas seseorang terbentuk melalui tiga bentuk pengakuan, yaitu hubungan emosional (*love*), penghormatan terhadap hak (*rights*), dan penghargaan sosial (*social esteem*) (Honneth, 2021). Dalam arena politik, pencalonan kepala daerah dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan sosial-politik karena kandidat dianggap memiliki kapasitas dan legitimasi untuk menjalankan fungsi publik.

Identitas politik seorang aktor tidak bersifat tetap, melainkan terus mengalami pembentukan melalui hubungan sosial, pengalaman politik, dan proses pengakuan dari kelompok lain. Seorang aktor politik mempertahankan identitasnya melalui simbol, narasi, serta hubungan dengan komunitas politik yang menjadi basis legitimasinya (Calhoun, 2019). Oleh karena itu, perubahan posisi politik akibat pergantian kandidat dapat menghasilkan konsekuensi terhadap cara seorang aktor memahami dirinya dan bagaimana masyarakat memandang legitimasi politiknya. Legitimasi dalam politik lokal tidak hanya berasal dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kemampuan aktor politik mempertahankan hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat. Ketika legitimasi tersebut mengalami gangguan, stabilitas identitas politik seorang aktor juga dapat mengalami perubahan (Norris, 2017).

Kajian mengenai demokrasi lokal selama ini lebih banyak menyoroti persoalan klientelisme, politik dinasti, strategi elektoral, dan dominasi elite dalam proses politik lokal (Aspinall & Berenschot, 2019). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih dipengaruhi oleh hubungan personal, patronase, dan distribusi sumber daya politik antaraktor (Power, 2018; Warburton & Aspinall, 2019). Selain itu, partai politik memiliki peran penting sebagai institusi yang menentukan siapa yang memperoleh kesempatan untuk masuk dalam arena kompetisi politik. Melalui proses seleksi kandidat, partai secara tidak langsung melakukan produksi legitimasi terhadap figur tertentu dan membatasi akses politik bagi aktor lainnya (Scarrow et al., 2017). Sementara itu, kajian mengenai perubahan posisi kandidat akibat pergantian pencalonan masih relatif terbatas, khususnya yang melihat pengalaman subjektif kandidat

sebagai bentuk krisis identitas politik dan kehilangan pengakuan. Padahal, perubahan posisi politik seorang kandidat dapat memengaruhi bagaimana individu tersebut memahami dirinya dalam arena kekuasaan dan bagaimana masyarakat melihat legitimasi politiknya.

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan sosiologi politik yang tidak hanya melihat pergantian kandidat sebagai proses kelembagaan, tetapi juga sebagai pengalaman sosial yang berkaitan dengan identitas dan pengakuan politik. Konsep pengakuan Honneth memberikan perspektif bahwa konflik politik dapat dipahami sebagai perjuangan untuk mempertahankan status, penghargaan, dan legitimasi dalam suatu arena sosial tertentu (Honneth, 2021). Kajian mengenai konflik politik lokal perlu memperhatikan dimensi sosial dari kekuasaan, karena praktik demokrasi tidak hanya berlangsung melalui aturan formal, tetapi juga melalui proses pembentukan makna, identitas, dan hubungan pengakuan antaraktor politik (Kenny, 2019). Dengan pendekatan tersebut, kasus pergantian calon wakil bupati Maros dapat dianalisis sebagai fenomena perubahan posisi politik yang melibatkan relasi kekuasaan, konflik elite, dan pengalaman kehilangan pengakuan.

Secara akademik, tulisan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi politik mengenai konflik elite lokal dengan memasukkan dimensi identitas politik dan pengakuan sebagai aspek analisis. Secara praktis, tulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses pergantian kandidat memengaruhi hubungan antaraktor politik, stabilitas koalisi, dan persepsi publik terhadap demokrasi lokal. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menganalisis konflik politik lokal dalam kasus pergantian calon wakil bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024 dengan melihat perubahan identitas politik dan pengalaman pengakuan seorang kandidat dalam arena kontestasi elektoral.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis konflik politik lokal dalam peristiwa pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi media, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber pemberitaan daring serta literatur akademik yang berkaitan dengan dinamika kandidasi politik, konflik elit lokal, dan teori pengakuan politik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis berupa berita media nasional maupun lokal. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara interpretatif untuk menemukan pola mengenai konflik elit, perubahan identitas politik, dan pengalaman kehilangan pengakuan politik dalam proses pergantian kandidat. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif teori Identitas Politik dan Pengakuan Axel Honneth untuk memahami bagaimana perubahan posisi politik seorang kandidat dapat memengaruhi konstruksi identitas, legitimasi, dan persepsi ketidakadilan dalam arena politik lokal (Honneth, 2021). Proses analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang menempatkan aktivitas kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan dalam penelitian kualitatif (Miles et al., 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024 tidak hanya mencerminkan perubahan dalam proses administratif pencalonan, tetapi juga merupakan fenomena politik yang melibatkan dinamika kekuasaan, negosiasi kepentingan elit, serta persoalan pengakuan terhadap identitas politik

seorang aktor. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana seorang kandidat yang sebelumnya telah memperoleh legitimasi melalui posisi sebagai wakil kepala daerah petahana dan calon peserta kontestasi mengalami perubahan posisi dalam arena politik lokal. Bagian ini berupaya mengungkap bagaimana pergantian kandidat dimaknai sebagai bagian dari konflik politik lokal, khususnya dalam melihat pengalaman kehilangan posisi, legitimasi, dan penghargaan sosial yang melekat pada identitas politik seorang aktor. Analisis dilakukan dengan menempatkan calon yang digantikan bukan hanya sebagai objek dari keputusan politik, tetapi sebagai aktor yang memiliki pengalaman, persepsi, dan upaya mempertahankan identitas politiknya dalam menghadapi perubahan konfigurasi kekuasaan. Proses tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaji melalui perspektif sosiologi politik, khususnya teori Identitas Politik dan Pengakuan Axel Honneth (2021), yang melihat konflik sosial sebagai akibat dari pengalaman *misrecognition* atau kegagalan memperoleh pengakuan yang dianggap layak. Melalui perspektif ini, pergantian calon Wakil Bupati Maros tidak hanya dipahami sebagai peristiwa elektoral, tetapi juga sebagai proses sosial-politik yang memperlihatkan bagaimana legitimasi, penghargaan, dan posisi seorang aktor diperebutkan dalam arena politik lokal.

### **Dinamika Pergantian Calon Wakil Bupati Maros dalam Kontestasi Politik Lokal Tahun 2024**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros Tahun 2024 menjadi salah satu arena politik lokal yang memperlihatkan bagaimana proses kandidasi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme formal pencalonan, tetapi juga melibatkan relasi kekuasaan, legitimasi politik, dan posisi sosial seorang aktor dalam arena politik. Dalam politik lokal Indonesia, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan proses yang kompleks karena melibatkan interaksi antara kandidat, partai politik, elit lokal, serta masyarakat sebagai basis legitimasi. Kandidat yang telah memperoleh dukungan politik tidak hanya membawa identitas personal, tetapi juga merepresentasikan kepentingan kelompok politik tertentu. Oleh karena itu, perubahan dalam komposisi kandidat dapat memengaruhi konfigurasi hubungan antaraktor yang telah terbentuk sebelumnya (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dalam konteks Pilkada Maros 2024, pasangan Chaidir Syam-Suhartina Bohari pada awalnya dipandang sebagai pasangan petahana yang memiliki modal politik kuat. Chaidir Syam merupakan Bupati Maros periode 2021-2024, sementara Suhartina Bohari menjabat sebagai Wakil Bupati Maros pada periode yang sama. Posisi sebagai kepala daerah petahana memberikan keuntungan politik berupa pengalaman pemerintahan, tingkat pengenalan publik, serta jaringan sosial yang telah terbentuk selama masa jabatan. Dalam kajian politik lokal, status petahana sering kali menjadi sumber daya politik penting karena memberikan akses terhadap modal simbolik dan sosial yang dapat memperkuat posisi kandidat dalam kompetisi elektoral (Aspinall & Warburton, 2018). Dengan demikian, pencalonan kembali Suhartina Bohari bukan hanya menunjukkan keberlanjutan pasangan politik, tetapi juga memperlihatkan adanya upaya mempertahankan konfigurasi kekuasaan lokal yang telah berjalan.

Namun, dinamika pencalonan tersebut mengalami perubahan ketika proses pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memasuki tahap penentuan. Berdasarkan pemberitaan media, Suhartina Bohari dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam tahapan pencalonan setelah hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa menunjukkan adanya persoalan terkait hasil tes narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan kemudian menyampaikan bahwa dari 140 bakal calon kepala daerah yang menjalani pemeriksaan narkotika, terdapat satu kandidat

yang terindikasi positif metamfetamin, yaitu bakal calon Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari (DetikSulsel, 2024).

Pemeriksaan tersebut menjadi titik balik dalam proses kandidasi karena menyebabkan perubahan posisi politik Suhartina Bohari dari kandidat yang dipersiapkan untuk kembali mengikuti kontestasi menjadi figur yang tidak dapat melanjutkan pencalonan. Media melaporkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara berulang sesuai prosedur BNN, dan hasil pemeriksaan lanjutan tetap menunjukkan indikasi positif metamfetamin. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar munculnya keputusan pergantian calon wakil bupati dalam pasangan Chaidir Syam (DetikNews, 2024). Dalam perspektif sosiologi politik, peristiwa ini menunjukkan bahwa posisi politik seorang kandidat dapat mengalami perubahan secara cepat akibat interaksi antara aturan formal, institusi politik, dan keputusan aktor yang memiliki kewenangan dalam proses elektoral.

Pergantian kandidat tersebut kemudian melibatkan proses adaptasi politik dari pasangan calon dan partai pengusung. Suhartina Bohari yang sebelumnya menjadi bagian dari konfigurasi politik petahana akhirnya digantikan oleh Andi Muetazim Mansyur sebagai calon wakil bupati pendamping Chaidir Syam. Pergantian tersebut menunjukkan bahwa partai politik dan elit lokal memiliki peran penting dalam mempertahankan keberlangsungan strategi elektoral. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan administratif pencalonan, tetapi juga menjadi aktor yang menentukan proses seleksi, pergantian, dan legitimasi kandidat (Mietzner, 2020).

Fenomena pergantian calon wakil bupati Maros juga memperlihatkan adanya dimensi konflik politik lokal yang tidak selalu tampil dalam bentuk pertentangan terbuka. Konflik dapat muncul melalui perubahan posisi seorang aktor dalam struktur politik dan melalui perebutan legitimasi atas siapa yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan politik tertentu. Setelah munculnya keputusan pergantian kandidat, berkembang pula persepsi publik mengenai kemungkinan adanya konflik internal atau upaya penghalangan terhadap Suhartina Bohari. Isu tersebut kemudian dibantah oleh Chaidir Syam yang menyatakan bahwa tidak terdapat upaya menjegal Suhartina dan hubungan politik keduanya tetap berjalan baik (DetikSulsel, 2024).

Dari sudut pandang politik lokal, situasi tersebut menunjukkan bahwa proses kandidasi merupakan arena yang mempertemukan kepentingan berbagai aktor. Pergantian kandidat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana elit politik mempertahankan stabilitas koalisi dan peluang kemenangan elektoral. Sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu, arena politik merupakan ruang kompetisi tempat aktor menggunakan berbagai modal untuk mempertahankan atau memperoleh posisi strategis (Bourdieu, 2018). Dalam kasus Maros, perubahan kandidat memperlihatkan adanya proses redistribusi posisi politik, di mana aktor lama kehilangan ruang kontestasi sementara aktor baru memperoleh kesempatan memasuki arena politik.

Selain itu, posisi Suhartina Bohari sebagai wakil bupati petahana menjadikan kasus ini memiliki dimensi sosial yang lebih kompleks. Pergantian tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap pencalonan formal, tetapi juga terhadap identitas politik yang telah melekat selama menjalankan jabatan publik. Status sebagai wakil bupati dan calon wakil bupati sebelumnya telah memberikan pengakuan sosial dan politik

dari berbagai kelompok masyarakat. Ketika status tersebut berubah, muncul persoalan mengenai bagaimana seorang aktor politik memahami perubahan identitas dan legitimasi yang dialaminya. Dalam perspektif Honneth, pengakuan sosial merupakan unsur penting dalam pembentukan identitas individu, termasuk dalam konteks politik, karena posisi seseorang dalam masyarakat terbentuk melalui penghargaan dan penerimaan dari lingkungan sosialnya (Honneth, 2021).

Respons Suhartina Bohari terhadap situasi tersebut menunjukkan adanya upaya mempertahankan posisi sosial-politiknya. Dalam pemberitaan, Suhartina menyatakan memilih untuk tidak memperpanjang polemik terkait hasil pemeriksaan dan fokus menyelesaikan tugas pemerintahan yang masih dijalankan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa meskipun mengalami perubahan posisi dalam arena elektoral, seorang aktor politik tetap berusaha mempertahankan legitimasi dan citra publiknya (DetikSulsel, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa konflik politik tidak selalu berakhir dengan hilangnya eksistensi politik seseorang, tetapi dapat menghasilkan strategi baru dalam mempertahankan identitas politik.

### **Konflik Politik dan Krisis Pengakuan Identitas Politik Calon Wakil Bupati yang Digantikan**

Pencalonan dalam kontestasi politik lokal tidak hanya memiliki makna sebagai proses formal untuk memenuhi persyaratan elektoral, tetapi juga merupakan bentuk pemberian pengakuan politik terhadap kapasitas, legitimasi, dan identitas seorang aktor. Dalam arena politik, seseorang yang telah ditetapkan sebagai kandidat memperoleh posisi simbolik sebagai representasi kepentingan masyarakat maupun kelompok politik tertentu. Pengakuan tersebut dibangun melalui dukungan partai politik, penerimaan elit, serta persepsi publik terhadap kemampuan kandidat dalam menjalankan kepemimpinan. Oleh karena itu, pencalonan seorang aktor politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan identitas politik yang memberikan legitimasi sosial sebelum seseorang memperoleh jabatan formal (Honneth, 2021).

Dalam konteks Pilkada Maros Tahun 2024, pencalonan Suhartina Bohari sebagai calon Wakil Bupati Maros tidak dapat dilepaskan dari identitas politik yang telah terbentuk sebelumnya. Sebagai Wakil Bupati Maros periode 2021–2024, Suhartina telah memiliki pengalaman pemerintahan, jaringan politik, serta posisi sosial sebagai bagian dari struktur kekuasaan daerah. Keputusan untuk kembali mencalonkan dirinya bersama Chaidir Syam menunjukkan bahwa dirinya telah memperoleh bentuk pengakuan politik dari koalisi pengusung dan lingkungan politik lokal. Dalam perspektif Honneth, pengakuan semacam ini berkaitan dengan dimensi *social esteem*, yaitu penghargaan sosial terhadap kapasitas seseorang berdasarkan kontribusi dan posisi yang dimilikinya dalam masyarakat (Honneth, 2021).

Pengakuan politik terhadap seorang kandidat tidak hanya berasal dari institusi formal, tetapi juga terbentuk melalui interaksi sosial yang panjang. Kandidat petahana memiliki keuntungan karena telah membangun hubungan dengan masyarakat melalui pengalaman menjalankan pemerintahan. Dalam politik lokal Indonesia, figur petahana sering memperoleh modal simbolik karena dianggap memiliki pengalaman dan rekam jejak yang dapat menjadi dasar legitimasi politik. Modal simbolik tersebut kemudian menjadi bagian dari identitas politik yang melekat pada kandidat (Bourdieu, 2018). Dengan demikian, posisi Suhartina Bohari sebagai calon wakil bupati petahana menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya hadir sebagai individu yang mengikuti pemilu, tetapi sebagai aktor politik yang telah memperoleh pengakuan dari berbagai jaringan sosial dan politik.

Namun, perubahan terjadi ketika hasil pemeriksaan kesehatan dalam tahapan Pilkada menyebabkan Suhartina Bohari tidak dapat melanjutkan proses pencalonan. Pergantian tersebut menghasilkan perubahan mendasar terhadap posisi politiknya. Sebelumnya, ia berada dalam posisi sebagai kandidat yang memiliki peluang untuk mempertahankan kekuasaan melalui proses elektoral, tetapi kemudian harus keluar dari arena kompetisi karena keputusan penyelenggara berdasarkan ketentuan pencalonan. Perubahan status tersebut menunjukkan bagaimana identitas politik seseorang sangat bergantung pada pengakuan sosial dan institusional yang melekat pada dirinya. Ketika pengakuan tersebut berubah, maka posisi sosial-politik seorang aktor juga mengalami transformasi.

Dalam perspektif teori pengakuan Axel Honneth, perubahan posisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *misrecognition* atau kegagalan pengakuan. Honneth menjelaskan bahwa konflik sosial muncul ketika individu merasa bahwa dirinya tidak memperoleh penghargaan atau pengakuan yang sesuai dengan identitas dan kontribusinya. Kegagalan pengakuan tidak selalu berbentuk diskriminasi langsung, tetapi dapat muncul melalui pengalaman kehilangan status, berkurangnya penghargaan sosial, atau tersingkirnya seseorang dari ruang partisipasi tertentu (Honneth, 2021). Dalam kasus pergantian calon Wakil Bupati Maros, pengalaman tersebut dapat dilihat melalui perubahan posisi Suhartina dari kandidat yang memperoleh legitimasi politik menjadi aktor yang tidak lagi berada dalam kompetisi elektoral.

Akan tetapi, konsep *misrecognition* dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindakan politik yang secara objektif bertujuan menyingkirkan seseorang. Sebaliknya, konsep tersebut digunakan untuk memahami bagaimana seorang aktor politik mengalami dan memaknai perubahan posisi yang terjadi terhadap dirinya. Dalam kajian sosiologi politik, pengalaman subjektif aktor merupakan bagian penting karena politik tidak hanya bekerja melalui institusi dan aturan, tetapi juga melalui persepsi, simbol, dan hubungan sosial. Dengan demikian, isu utama bukan hanya apakah pergantian tersebut sesuai aturan, tetapi bagaimana perubahan tersebut dipahami oleh aktor yang mengalami kehilangan posisi politik (Fraser & Honneth, 2018).

Pergantian kandidat juga memperlihatkan bahwa identitas politik bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan terus dibentuk melalui hubungan antara individu dan struktur politik. Seorang kandidat memperoleh identitas politik melalui proses pengakuan dari partai, elit, dan masyarakat. Namun, ketika terjadi perubahan dalam struktur dukungan politik, identitas tersebut dapat mengalami pelemahan atau negosiasi ulang. Dalam konteks ini, pengalaman Suhartina Bohari memperlihatkan bagaimana seorang aktor politik harus menghadapi perubahan status dari figur yang diproyeksikan sebagai calon pemimpin menjadi aktor yang berada di luar kontestasi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa arena politik lokal merupakan ruang yang dinamis dan penuh dengan proses pembentukan maupun kehilangan legitimasi (Mouffe, 2018).

Meskipun mengalami perubahan posisi dalam pencalonan, respons Suhartina Bohari menunjukkan adanya upaya mempertahankan identitas politik yang telah terbentuk. Berdasarkan pemberitaan media, Suhartina memilih untuk tidak memperpanjang polemik mengenai hasil pemeriksaan dan menyatakan tetap menjalankan tugas pemerintahan sebagai Wakil Bupati Maros. Sikap tersebut dapat dipahami sebagai bentuk strategi mempertahankan pengakuan sosial bahwa dirinya tetap memiliki kapasitas dan legitimasi sebagai pejabat publik meskipun tidak lagi menjadi bagian dari pasangan calon dalam Pilkada 2024

(DetikSulsel, 2024). Dalam perspektif Honneth, perjuangan memperoleh pengakuan tidak selalu dilakukan melalui konflik terbuka, tetapi dapat melalui tindakan mempertahankan martabat dan posisi sosial seseorang.

Pergantian calon Wakil Bupati Maros Tahun 2024 memperlihatkan bahwa proses politik lokal tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pergantian figur dalam surat pencalonan, tetapi juga menyangkut persoalan identitas, legitimasi, dan pengakuan sosial. Kandidasi politik memberikan seseorang status dan penghargaan tertentu dalam masyarakat, sementara pergantian kandidat dapat menciptakan pengalaman kehilangan posisi yang sebelumnya telah diperoleh. Konflik politik lokal dapat dipahami sebagai konflik mengenai pengakuan, yaitu bagaimana seorang aktor berusaha mempertahankan identitas dan nilai dirinya dalam menghadapi perubahan relasi kekuasaan.

### **Relasi Elit Politik dan Implikasi Pergantian Kandidat terhadap Demokrasi Lokal**

Pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024 memperlihatkan bahwa proses kandidasi dalam politik lokal tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kandidat, partai politik, dan elit politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kontestasi. Dalam sistem demokrasi elektoral, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan administratif bagi kandidat, tetapi juga menjadi institusi yang melakukan seleksi, negosiasi, dan produksi legitimasi terhadap calon yang akan diusung. Proses kandidasi merupakan arena politik yang mempertemukan kepentingan berbagai aktor, baik kandidat yang memiliki modal sosial maupun elit partai yang memiliki kewenangan menentukan keputusan strategis (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dalam kasus Pilkada Maros 2024, pasangan Chaidir Syam–Suhartina Bohari sebelumnya dibangun sebagai representasi keberlanjutan pemerintahan petahana. Posisi Suhartina sebagai Wakil Bupati Maros sekaligus calon wakil bupati menunjukkan adanya hubungan politik yang telah terbentuk antara kandidat, partai pengusung, dan basis pendukung. Namun, ketika Suhartina tidak dapat melanjutkan pencalonan akibat hasil pemeriksaan kesehatan, terjadi perubahan konfigurasi politik yang mengharuskan elit politik melakukan penyesuaian strategi. Pergantian kandidat tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan sebuah pencalonan tidak hanya bergantung pada legitimasi individu kandidat, tetapi juga pada kemampuan struktur politik untuk mempertahankan stabilitas koalisi dan peluang elektoral (Mietzner, 2020).

Dalam perspektif sosiologi politik, perubahan kandidat dapat dipahami sebagai proses redistribusi kekuasaan dalam arena politik lokal. Elit politik memiliki posisi strategis karena mereka memiliki kemampuan untuk menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya politik dan siapa yang kehilangan ruang dalam kontestasi. Bourdieu menjelaskan bahwa arena politik merupakan ruang persaingan tempat aktor menggunakan berbagai bentuk modal, seperti modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik untuk mempertahankan posisi atau memperoleh dominasi (Bourdieu, 2018). Dalam konteks Maros, pergantian calon wakil bupati memperlihatkan adanya pergeseran posisi politik, yaitu dari kandidat yang sebelumnya memperoleh pengakuan sebagai representasi politik menjadi kandidat pengganti yang harus membangun legitimasi baru.

Masuknya Andi Muetazim Mansyur sebagai calon wakil bupati pengganti menunjukkan bagaimana legitimasi politik dapat diproduksi kembali melalui mekanisme elit dan organisasi politik. Kandidat pengganti

tidak hanya membutuhkan penerimaan administratif dari penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan penerimaan dari partai pengusung, jaringan politik, serta masyarakat pemilih. Dalam politik elektoral Indonesia, legitimasi kandidat sering kali dibangun melalui kombinasi antara keputusan elit partai dan kemampuan kandidat membangun hubungan dengan pemilih (Aspinall & Warburton, 2018). Dengan demikian, pergantian kandidat memperlihatkan bahwa akses terhadap kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas personal, tetapi juga oleh posisi seseorang dalam struktur relasi politik yang lebih luas.

Dinamika tersebut juga memperlihatkan adanya ketegangan antara logika kelembagaan demokrasi dan pengalaman subjektif aktor politik yang kehilangan posisi. Dari perspektif demokrasi prosedural, pergantian kandidat merupakan bagian dari mekanisme yang telah diatur dalam tahapan Pilkada. Namun, dari perspektif sosiologi politik, proses tersebut dapat menghasilkan pengalaman eksklusi bagi aktor yang sebelumnya telah memperoleh pengakuan politik. Honneth menjelaskan bahwa eksklusi dari suatu ruang sosial tertentu dapat memengaruhi identitas seseorang karena pengakuan sosial merupakan bagian penting dalam membangun posisi individu dalam masyarakat (Honneth, 2021). Oleh karena itu, perubahan kandidat tidak hanya berdampak pada strategi elektoral, tetapi juga pada hubungan sosial dan simbolik antara aktor politik dengan lingkungan pendukungnya.

Dari sisi demokrasi lokal, pergantian kandidat memiliki implikasi terhadap persepsi publik mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap proses politik. Perubahan kandidat yang terjadi menjelang tahapan pencalonan dapat menimbulkan berbagai interpretasi di masyarakat, mulai dari pemahaman bahwa keputusan tersebut merupakan konsekuensi regulasi hingga munculnya dugaan adanya konflik kepentingan antaraktor politik. Dalam konteks demokrasi yang terkonsolidasi, kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh sejauh mana proses politik dipandang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Mietzner, 2020). Oleh karena itu, komunikasi politik dari partai dan kandidat menjadi penting untuk menjaga legitimasi proses pergantian tersebut.

Kasus pergantian calon Wakil Bupati Maros Tahun 2024 menunjukkan bahwa demokrasi lokal bekerja melalui hubungan yang kompleks antara aturan formal, kepentingan elit, dan pengalaman sosial aktor politik. Pergantian kandidat tidak hanya mencerminkan mekanisme penggantian figur dalam kontestasi elektoral, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dan bagaimana legitimasi diproduksi dalam arena lokal. Melalui perspektif teori pengakuan Axel Honneth, fenomena ini menunjukkan bahwa akses terhadap kekuasaan politik selalu berkaitan dengan proses pemberian dan kehilangan pengakuan. Dengan demikian, dinamika elit dalam Pilkada Maros tidak hanya menentukan siapa yang dapat berkompetisi, tetapi juga membentuk bagaimana identitas politik, legitimasi, dan posisi sosial seorang aktor dipertahankan atau mengalami perubahan.

## **SIMPULAN**

Pergantian calon Wakil Bupati Maros pada Pilkada Tahun 2024 menunjukkan bahwa proses politik lokal tidak semata-mata berlangsung dalam kerangka administratif dan prosedural, tetapi juga merupakan arena sosial yang mempertemukan kepentingan elit, legitimasi politik, serta persoalan identitas dan pengakuan seorang aktor. Dinamika pencalonan Suhartina Bohari sebagai Wakil Bupati Maros petahana memperlihatkan bahwa seorang kandidat telah memperoleh pengakuan politik melalui pengalaman

pemerintahan, dukungan partai, serta legitimasi sosial dari masyarakat. Namun, perubahan status akibat hasil pemeriksaan kesehatan dan keputusan pergantian kandidat menyebabkan terjadinya transformasi posisi politik dari aktor yang sebelumnya berada dalam arena kontestasi menjadi pihak yang tidak lagi melanjutkan pencalonan. Dalam perspektif teori Identitas Politik dan Pengakuan Axel Honneth, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai pengalaman perubahan relasi pengakuan, di mana seorang aktor politik berpotensi mengalami *misrecognition* akibat hilangnya posisi, penghargaan sosial, dan legitimasi yang sebelumnya melekat pada dirinya. Di sisi lain, pergantian kandidat juga memperlihatkan kuatnya peran elit politik dan partai dalam menentukan akses terhadap kekuasaan melalui proses seleksi, negosiasi, dan produksi legitimasi terhadap kandidat pengganti. Kasus ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral formal, tetapi juga oleh dinamika relasi kekuasaan antaraktor yang memengaruhi siapa yang memperoleh ruang untuk berkompetisi dan memperoleh pengakuan politik. Dengan demikian, pergantian calon Wakil Bupati Maros Tahun 2024 dapat dipahami sebagai fenomena konflik politik lokal yang memperlihatkan hubungan kompleks antara struktur kekuasaan, strategi elit, identitas politik, dan perjuangan mempertahankan pengakuan dalam arena demokrasi elektoral.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). Village Head Elections in Java: Money Politics and the Limits of Democratic Deepening. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(2), 267–291. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>

Aspinall, E., & Warburton, E. (2018). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.2991/icpsps-17.2018.1>

Bourdieu, P. (2018). The Forms of Capital. Dalam R. Nice (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Routledge.

Calhoun, C. (2019). *The Roots of Radicalism: Tradition, the Public Sphere, and Identity Politics*. University of Chicago Press.

DetikNews. 2024. Tak Lolos Tes Kesehatan Pilbup, Cawabup Petahana Maros Positif Narkoba. Detik.com. (<https://news.detik.com/pilkada/d-7550682/tak-lolos-tes-kesehatan-pilbup-cawabup-petahana-maros-positif-narkoba>, diakses tanggal 2 Juni 2026).

DetikSulsel. 2024. BNN Sulsel Ungkap Tes Narkotika Wabup Maros Suhartina Positif Metamfetamin. Detik.com. (<https://www.detik.com/sulsel/pilkada/d-7550579/bnn-sulsel-ungkap-tes-narkotika-wabup-maros-suhartina-positif-metamfetamin>, diakses tanggal 2 Juni 2026).

DetikSulsel. 2024. Bupati Maros Chaidir Syam Tepis Isu Jegal Suhartina Bohari di Pilkada. Detik.com. (<https://www.detik.com/sulsel/pilkada/d-7546254/bupati-maros-chaidir-syam-tepis-isu-jegal-suhartina-bohari-di-pilkada>, diakses tanggal 2 Juni 2026).

DetikSulsel. 2024. Suhartina Soal BNN Sulsel Ungkap Hasil Tesnya Positif Narkoba: Anggap Selesai. Detik.com. (<https://www.detik.com/sulsel/pilkada/d-7551439/suhartina-soal-bnn-sulsel-ungkap-hasil-tesnya-positif-narkoba-anggap-selesai>, diakses tanggal 2 Juni 2026).

- Fraser, N., & Honneth, A. (2018). *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. Verso Books.
- Hadiz, V. R. (2017). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Honneth, A. (2021). *Recognition or Disagreement: A Critical Encounter on the Politics of Freedom, Equality, and Identity*. Columbia University Press.
- Kenny, P. D. (2019). *Populism and Patronage: Why Populists Win Elections in India, Asia, and Beyond*. Oxford University Press.
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Mouffe, C. (2018). *For a Left Populism*. Verso Books.
- Norris, P. (2017). *Strengthening Electoral Integrity*. Cambridge University Press.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Sawer, M. (2020). Political Representation and Recognition: Identity, Difference and Democratic Inclusion. *Representation*, 56(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/00344893.2019.1689767>
- Scarrow, S. E., Webb, P. D., & Poguntke, T. (2017). *Organizing Political Parties: Representation, Participation, and Power*. Oxford University Press.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2019). *Contentious Politics (2nd ed.)*. Oxford University Press.
- Tornquist, O., & Stokke, K. (2018). *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics*. Springer.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. *Contemporary Politics*, 25(5), 523–545. <https://doi.org/10.1080/13569775.2019.1627737>

### **PROFIL SINGKAT**

Muhammad Salman lahir di Kabupaten Maros pada tanggal 6 Januari 1985. Penulis bekerja sebagai Komisioner KPU Kabupaten Maros periode 2023-2028 pada jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Penulis menamatkan pendidikan sarjana dari program studi Pendidikan Matematika di STKIP YAPIM Maros pada tahun 2011. Saat ini penulis berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana pada program studi Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sejak tahun 2025.